

DEKADENSI PARTISIPASI POLITIK DAN KEPERCAYAAN PUBLIK: PERSPEKTIF DAN STRATEGI MITIGASI PARTAI POLITIK

Keynagaya Ahmadine Surya*, Muhammad Adel Nurfirmansyah, Uswatun Khasanah, Tia Fahira Septiana, Rivan Dwi Kurniawan, Sri Untari

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author, email: keynagaya.ahmadine.2407116@students.um.ac.id

doi: 10.17977/um063.v5.i10.2025.5

Keywords

Political parties
Public trust
Political participation
Apathy
Millennials

Kata Kunci

Partai politik
Kepercayaan publik
Partisipasi politik
Apatisme
Milennial

Abstract

The political role in the governance of Indonesia focuses on the function of political parties as an important part of the political infrastructure. Based on Law No. 2 of 2011, political parties have the function of providing political education, creating unity, and channeling the aspirations of the people. However, there is a decline in public trust in political parties as reflected in surveys and a decrease in electoral participation. This research uses a qualitative method with interview and observation approaches to examine the perspectives and mitigation strategies of the political parties Gerindra and PKB in increasing public trust. The results show that political apathy, especially among millennials and Gen Z, arises due to a lack of political education, as well as the influences of globalization and westernization. This apathy contributes to a decline in political participation and trust in political parties, which poses a significant challenge to democracy in Indonesia. The mitigation efforts undertaken by political parties need to be strengthened in order to improve their image and increase public participation in a more meaningful and responsible political life. Active participation and public trust are the pillars of a strong democracy; the success of political parties in fulfilling their functions will determine the future of democracy in Indonesia.

Abstrak

Peran politik dalam ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada fungsi partai politik sebagai bagian penting infrastruktur politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik memiliki fungsi memberikan pendidikan politik, menciptakan persatuan, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Namun, terdapat penurunan kepercayaan publik terhadap partai politik yang tercermin dari survei dan turunnya partisipasi pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi untuk mengkaji perspektif dan strategi mitigasi partai politik dari Partai Gerindra dan PKB dalam meningkatkan kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apatisme politik, terutama di kalangan milenial dan Gen Z, timbul karena kurangnya pendidikan politik, serta pengaruh globalisasi dan westernisasi. Apatisme tersebut berkontribusi pada menurunnya partisipasi politik dan kepercayaan terhadap partai politik, yang menjadi tantangan signifikan bagi demokrasi di Indonesia. Upaya mitigasi yang dilakukan partai politik perlu diperkuat agar dapat memperbaiki citra dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. Partisipasi aktif dan kepercayaan publik merupakan pilar demokrasi yang kokoh, keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsinya akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia.

1. Pendahuluan

Politik, merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Menurut Burhanuddin Yusuf (2018), kata atau istilah "politik" memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan dan cara penggunaannya. Ini berlaku baik dalam konteks kelompok masyarakat kecil maupun di tingkat yang lebih besar, seperti dalam suatu negara, bahkan di tataran internasional. Politik mencakup bagaimana kekuasaan diperoleh, serta bagaimana cara pengelolaannya sesuai

dengan aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, negara, atau antar negara tempat kekuasaan tersebut diterapkan. Secara singkat, politik dapat diartikan sebagai ketatanegaraan.

Dan untuk itu, dalam menjalankan sistem perpolitikan Indonesia, yang mana didalam skema struktur dan proses kehidupan politik menurut UUD NRI 1945, pada bagian Infrastruktur Politik, salah satunya adalah unsur partai politik. Yang mana partai politik juga menjadi dasar penting sebagai komponen negara, karena banyak kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yang diharuskan melalui partai politik. Fungsi Partai Politik menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 11 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun nyatanya, dalam artikel yang diunggah dalam Kompas.com, menyatakan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Parpol, yang dinyatakan bahwasanya hanya 58% dari responden menyatakan percaya terhadap parpol, sedangkan 30% responden menyatakan kurang percaya, bahkan sebanyak 3% menyatakan sangat tidak percaya. Di Dalam data lain, juga menyatakan perihal penurunan partisipasi politik masyarakat. Di Dalam artikel Kompas.id, menyatakan bahwa KPU mencatat penurunan partisipasi pemilu, yang awalnya 81,97% menjadi 81,79% atau sekitar 164.227.475 suara sah yang dicatat oleh KPU.

2. Metode

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yang melakukan pendekatan dengan wawancara dan observasi ke lapangan yang memuat tema tentang perspektif dan strategi mitigasi partai politik dalam meningkatkan kepercayaan publik. Sumber data artikel ini adalah dua pandangan dari partai politik Gerindra dan juga partai politik PKB. Dari perwakilan partai Gerindra dengan nama Abri Fitrah Pamungkas. Kemudian juga dari ketua PKB dengan nama bapak H. Fatchullah, SH. Masing-masing perwakilan memberikan tanggapan tentang menurunnya kepercayaan publik yang sekarang di hadapi dan juga strategi mereka dalam meningkatkan kepercayaan publik dalam partai politik tersebut.

Teknik pengumpulan data yaitu observasi ke lapangan dengan mewawancarai praktisi dari masing-masing partai yang dilakukan selama 3 hari, dimana 2 hari di partai PKB dan juga 1 hari di partai Gerindra. Kami mengambil data dengan bantuan recorder berupa audio dan juga adanya dokumentasi seperti video YouTube yang dibuat oleh partai PKB. Kemudian analisis dilakukan dengan menggabungkan hasil data wawancara dengan beberapa teori-teori yang sudah ada.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam kondisi era disrupsi yang begitu masif, yang mana mampu merubah tatanan sosial masyarakat Indonesia, politik nampak menemui permasalahan yang baru, yaitu apatisme. dalam melihat kondisi fluktuasi perpolitikan yang begitu dinamis, nampaknya tak sedikit orang yang mulai malas menanggapi perihal perpolitikan. Kerap kali muncul pula asumsi-asumsi yang mencurigai adanya praktik-praktik culas seperti dinasti politik, adanya kekuasaan oligarki, penikaman hukum, dan lain sebagainya, semakin memperburuk citra perpolitikan dimata masyarakat, yang didominasi oleh kelompok milenial dan gen z.

Kecenderungan milenial dan gen z yang lebih mudah terpapar akan informasi akibat adanya akses internet, menyebabkan pemikiran mereka yang lebih terbuka akan isu-isu yang menyebar, seperti isu sosial dan begitu pula dengan isu politik politik. Gabungan dari akses internet yang luas, dan paparan berita yang menginformasikan tentang isu-isu buruk dunia perpolitikan, yang menyebabkan besarnya angka golput dan apatisme utamanya didominasi pula oleh golongan milenial dan gen z.

Apatisme ini, tentu diakibatkan dari banyak hal. Selain berdasarkan penjelasan diatas, apatisme ini juga dapat diakibatkan dari kurangnya pendidikan politik, imbas dari budaya westernisasi dan globalisasi yang diminati dengan cara fanatik. Perkara globalisasi dan westernisasi, bukan merupakan masalah besar jika dibarengi dengan prinsip-prinsip seperti "Memilah dan Memilih Informasi" atau seperti "Saring Sebelum Sharing" yang dibiasakan. Namun, akan menjadi masalah jikalau tidak adanya prinsip-prinsip tadi yang membarengi, serta sifat fanatisme yang militan. Hal tersebut berimbas pada sulitnya pendidikan politik pada orang-orang tersebut, yang menganggap hal-hal selain apa yang dirinya senang, bukanlah hal yang penting dan perlu untuk diketahui apalagi difahami. Di Sisi yang sama, masalah pendidikan politik ini, juga menemukan masalah pada orang yang "Terlanjur" apatis. Orang yang memiliki pola pikir apatis ini, akan sulit dididik dikarenakan berpikir apa yang diyakini benar atau sekadar tidak ingin belajar hal-hal yang berkorelasi dengan politik.

Hal-hal diatas, tentunya dapat menimbulkan hal yang lebih besar, utamanya bagi dunia perpolitikan di Indonesia. Beberapa masalah tersebut adalah menurunnya partisipasi politik masyarakat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol). Tentunya, partisipasi politik masyarakat adalah komponen penting dalam menjaga nilai demokrasi, yang mana peran serta masyarakat, begitu menentukan akan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia.

Di Sisi yang sama, penurunan kepercayaan terhadap parpol, juga mengindikasikan adanya kesalahan pada dunia perpolitikan di Indonesia. Banyak asumsi yang menyelimuti partai politik, seperti isu petugas parpol, fanatisme-militan para pendukungnya, kurang tampaknya disposisi partai terhadap isu-isu yang ada, dan lain sebagainya, semakin memperburuk citra parpol, yang mana merupakan salah satu komponen utama infrastruktur politik dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya isu-isu kaitannya dengan partai politik, pastilah mereka tidak tinggal diam. Upaya-upaya dalam memitigasi kondisi pelik ini, selalu dijalankan oleh parpol. Berdasarkan hasil analisis yang didapat dari sampling 2 partai politik yaitu PKB dan Partai Gerindra, menghasilkan beberapa data kaitannya dengan permasalahan ini.

3.1. Akar Masalah

Berdasarkan pemaparan dari narasumber yang diwawancarai, setidaknya menghasilkan beberapa benang merah, bagaimanakah penurunan partisipasi politik dan penurunan kepercayaan terhadap parpol ini, dapat terjadi. Hal tersebut, dijabarkan sekurang- kurangnya ada 3 poin pokok, yaitu:

3.1.1. Adanya Luka Lama Pasca Reformasi

Berdasarkan penjelasan narasumber, salah satu indikasi penurunan partisipasi politik dan kepercayaan ini, diakibatkan oleh luka lama pasca gerakan reformasi terjadi. Hal tersebut merupakan imbas dari adanya beberapa partai politik yang gagal berkuasa di senayan. Banyak dari partai-partai yang gagal itu, bergabung dengan partai yang berhasil duduk di senayan. Namun, tak sedikit juga, partai yang gagal itu, justru seakan menyimpan luka dalam hatinya.

Para pendukung atau konstituen mereka yang setia, tetap berpegang teguh pada partai dan golongan mereka. Yang mana dengan adanya kegagalan ini, mengakibatkan pandangan seakan "Lebih Baik Tidak Masuk Senayan, Daripada Masuk Partai Lain." Tentu, tidak semua anggota dari kelompok yang kalah ini, betul- betul tidak ingin bergabung pada partai pemenang dan tetap melanggengkan diri dalam perpolitikan. Namun, mereka yang tidak ingin lepas dari golongannya, juga tetap berkontribusi, terhadap dekadensi partisipasi politik dan kepercayaan terhadap parpol, yang sehingga sekarang ini masih dapat dirasakan.

3.1.2. Ingkar Janji Konstituen

Politik, pastilah tidak luput dari pergulatan kepentingan didalamnya. Begitupun juga dengan partai politik yang juga terkena imbasnya. Perebutan kekuasaan dan ambisi pribadi seperti halnya memperkaya diri, kerap mengesampingkan idealisme partai dan solidaritas maupun harapan konstituen yang berada pada jalur perjuangan yang sama.

Penyelewengan atau dikesampingkannya idealisme parpol dan harapan konstituen, pastilah menimbulkan perasaan kekecewaan. Hal ini, dapat berimbas terhadap pupusnya harapan terhadap partai yang didukung, maupun semua partai politik yang ada, hingga dunia politik yang dianggap sudah menghancurkan harapan mereka. Sikap inilah, yang dapat menimbulkan dekadensi partisipasi politik dan kepercayaan terhadap parpol.

3.1.3. Kurangnya Pendidikan Politik

Kurangnya pendidikan politik ini, bukan hanya masalah yang berkulat pada hal-hal politik, tetapi juga hal ekonomi. Upaya pendidikan politik, selain menemui tantangan seperti “terlanjur” apatis, kondisi politik yang kerap tidak sesuai dengan apa yang diutarakan dalam teori politik, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang masih belum mumpuni, disini lain juga muncul masalah ekonomis. Masalah ini muncul akibat mahalnya biaya akomodasi yang dikeluarkan untuk diadakannya pendidikan politik. Hal-hal seperti harus adanya amplop agar ingin datang, biaya makan-minum, biaya transportasi, dan lain sebagainya, pastilah menghambat progres pengembangan pendidikan politik di Indonesia.

Masalah ekonomi ini, juga acap kali ditemui ketika adanya pemilu dalam suatu daerah. Praktik pemberian bansos, serangan fajar, dan kampanye lapangan, pastilah mengeluarkan biaya yang besar. Ungkapan “Dapat berapa?” mengindikasikan kurangnya semangat perang melawan praktik-praktik culas tersebut. Namun dari sudut pandang parpol sendiri, hal ini pula dianggap sebagai anomali. Yang mana, masyarakat yang belum atau bahkan tidak ingin terdidik akan perpolitikan, justru seakan “memanfaatkan” kondisi ini, sebagai “ladang” penghasilan. Banyak praktisi, yang juga menemui fenomena “Adu Bayaran” yang menunjukkan adanya korelasi antara besaran “Bayaran” atau sogokan yang didapat dengan persentase pemilih. Dalam sudut pandang parpol hal ini juga membingungkan, dimana ada suatu dilema besar untuk memenangkan kontestasi pemilu, yaitu antara kalah dengan jujur (artinya tidak berbuat apa-apa kecuali kampanye biasa) atau menang dengan curang hanya untuk sekadar mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam pemilu.

Hal-hal diatas merupakan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para praktisi politik di lapangan. Masalah-masalah tersebut, pastilah dapat menghambat perbaikan sistem perpolitikan di Indonesia. Pandangan yang masih berlandaskan akan politik transaksional, sayangnya seakan sudah mendarah daging dalam masyarakat, dan mau tidak mau menjadi bagian dari sistem perpolitikan di Indonesia.

3.2. Strategi Mitigasi

Partai politik, paham betul dengan permasalahan yang ada. Mereka juga tidak tinggal diam dalam menghadapi hingga menanggulangi permasalahan yang ada. Strategi ini, memiliki berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda, utamanya berkaitan dengan ideologi partai tersebut. Partai politik yang berhaluan Islamik misalnya, memiliki kecenderungan pendekatan yang lebih religius, contohnya berupa pengajian.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber yang diwawancarai, muncul setidaknya 3 strategi mitigasi yang dilakukan oleh parpol terkait dalam mencegah atau menangani permasalahan, kaitannya dengan dekadensi partisipasi politik dan kepercayaan terhadap parpol, yang disebutkan sebagai berikut:

3.2.1. Pendidikan Politik Sedari Tingkat Terkecil dan Dikolaborasikan dengan Teknologi

Partai politik, memiliki cara mereka tersendiri untuk menyentuh konstituen sedekat mungkin, yaitu dengan pemberdayaan sedari tingkat paling kecil yaitu RT atau RW. Pendekatan ini, akan menampilkan citra “Merakyat” pada parpol yang melaksanakannya. Kondisi ini, dapat dimanfaatkan untuk penanaman pendidikan politik, sedekat mungkin dengan masyarakat yang terdampak. Pendidikan ini, juga dapat diintegrasikan melalui media sosial atau internet secara umum, agar dapat mencapai basis masa seluas mungkin, dengan effort dan biaya seminimal mungkin.

3.2.2. Perluasan Program dengan Serap Aspirasi

Teknik ini, tidak hanya dilakukan oleh petugas-petugas partai di lapangan, tetapi juga dilakukan oleh para anggota dewan, yang berada di DPRD. Mereka juga melakukan kunjungan ke masyarakat atau yang biasa dikenal dengan masyarakat, dengan tujuan menampung aspirasi mereka. Pelaksanaan kegiatan ini, biasanya dilakukan ketika masa reses sidang DPRD, atau ketika para anggota dewan istirahat dari rutinitas legislasi mereka yaitu sidang. Reses dilaksanakan 3 kali dalam setahun, yang mana serap aspirasi ini juga dilakukan bertepatan dengan masa reses yang sama.

Sama halnya dengan program pendidikan politik, kegiatan serap aspirasi ini, juga dapat dikolaborasikan dengan penggunaan internet khususnya media sosial. Selain mengurangi effort dan biaya yang dikeluarkan, serta dapat dijangkau masyarakat dengan lebih luas, penggunaan internet atau media sosial khususnya, juga menjadi alat branding diri, bagi para anggota dewan.

3.3. Perumusan Program dengan Keterlibatan Masyarakat

Program yang disusun oleh anggota dewan bersama dengan partai politik, harus menghadirkan masyarakat dalam proses perumusannya. Hal ini dapat membuat citra baik partai politik, dan meminimalisir kesalahan regulasi, karena sudah diikutsertakannya masyarakat dalam proses perumusannya.

Hal-hal diatas, merupakan rangkuman langkah-langkah mitigasi parpol dalam mencegah dan menangani dekadensi partisipasi politik dan kepercayaan terhadap parpol. Banyak pengembangan yang dilakukan utamanya dalam merelevansikan eksistensi parpol dengan perubahan trend zaman. Kegiatan seperti E-Sport, juga menjadi salah satu contoh upaya parpol dalam menggaet hati masyarakat secara tidak langsung. Upaya lain yang menjelaskan perihal upaya pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dapat dilakukan dengan pemberian bantuan tanpa pandang bulu. Secara tidak langsung, ada pendidikan politik “terselubung” dan upaya persuasif yang dijalankan partai untuk menggaet hati masyarakat seluas dan sebanyak mungkin, untuk menjadi simpatisan atau bahkan kader partai.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Permasalahan politik yang terjadi di era disrupsi ini adalah apatisisme. Apatisme ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pendidikan politik, imbas dari budaya westernisasi dan globalisasi yang diminati secara fanatik. Dari hal tersebut lah dapat menimbulkan hal yang lebih besar, terutama bagi dunia perpolitikan di Indonesia. Dari hal tersebut dapat memberikan dampak kepada dunia perpolitikan seperti, menurunnya partisipasi politik masyarakat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol). Sedangkan partisipasi politik ini merupakan komponen yang penting untuk menjaga nilai demokrasi, yang mana peran masyarakat juga sangat menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan pemaparan masalah diatas dari narasumber yang diwawancarai, bahwa penurunan partisipasi politik dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ini, terjadi karena ada beberapa hal yaitu, adanya luka lama pasca reformasi, ingkar janji konstituen, dan kurangnya pendidikan politik. Dari permasalahan yang sudah dipaparkan, parpol juga memiliki beberapa upaya dan strategi yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu, Memberikan pendidikan politik sedari tingkat terkecil dan dikolaborasikan dengan teknologi, Perluasan dengan serap aspirasi, dan Perumusan program dengan keterlibatan masyarakat. Dengan begitu Partisipasi politik yang tinggi dan kepercayaan masyarakat yang kuat merupakan kunci bagi keberlangsungan demokrasi dan masa depan bangsa Indonesia.

Daftar Rujukan

- Ahyar, M. (2018). Al-mawardi dan konsep khilafah islamiyyah: Relevansi sistem politik Islam klasik dan politik modern. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 15(1), 1-26.
- Budianto, H. (2014). Strategi penanganan krisis partai dari pandangan publik. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(01), 154-168.
- Nababan, W. M. (2024). *KPU akui tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2024 sedikit turun*. Retrieved From Kompas.Id: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/25/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024-sedikit-menurun>
- Rosit, M. (2025). *Kepercayaan publik mengkhawatirkan, saatnya Parpol berbenah*.

Yusuf, B. (2018). Politik dalam Islam: Makna, tujuan dan falsafah (kajian atas konsep era klasik). *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(1), 114-130.